



Nilai Kearifan Lokal Ternate dan Perwujudan Pemerintahan Baik

Darwis Haris ²✉

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia.

Email : darwisharis21@gmail.com

Info Artikel :	<input checked="" type="checkbox"/> Artikel Penelitian	<input type="checkbox"/> Artikel Pengabdian	<input type="checkbox"/> Riview Artikel
Diterima :	26 Mei 2023, Disetujui : 16 Juni 2023, Publikasi On-Line : 17 Juni 2023		

Vol.	No.
3	1
Hal 18 - 21	

Abstrak.

Pemerintahan yang bersih merupakan salah satu tujuan utama dari setiap tingkatan pemerintahan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Upaya mewujudkan hal tersebut dapat diwujudkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Prinsip-prinsip pemerintahan telah diwariskan dalam nilai-nilai kearifan budaya lokal yang diterapkan oleh sebagian besar masyarakat di Maluku Utara yang sebagian besar merupakan wilayah kesultanan, seperti filosofi Jou Sengofangare di Kesultanan Ternate yang menghargai pentingnya hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan..

Keyword : Kearifan Lokal, pemerintahan, Ternate

✉ **Koresponden Author :**

Darwis Haris

Email : darwisharis21@gmail.com

Universitas Muhammadiyah
Maluku Utara
Ternate, Indonesia



Copyright©
2023. Darwis Haris

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) atau penyerahan kewenangan dan fungsi pemerintah dari pusat ke daerah membawa konsekwensi pada penyelenggaraan pemerintah di daerah yang lebih mandiri, terlepas dari bimbingan dan ketergantungan dari pusat. Otonomi daerah juga harus dipandang pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah sebagai perwujudan dari manajemen modern yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah Kota / Kabupaten menjadi lebih besar dalam menyelenggarakan program pembangunan, peran dilakukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Hal ini dilakukan sebagai perubahan paradigma pelaksanaan pemerintah yang tentunya juga disertai dengan berbagai konfigurasi kepentingan tingkat nasional, maupun daerah. Pelaksanaan otonomi daerah bagi setiap propinsi berdasarkan Undang – Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Isyarat Undang – Undang tersebut yang paling mendasar adalah mendorong dan memberdayakan pemerintah daerah maupun masyarakat secara bersama – sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program pembangunan. Selain itu dibutuhkan kemampuan prakarsa dan kreatifitas dari peran masyarakat secara bersama – sama mengembangkan peran dan fungsi lembaga legislatif pengawas dan penentu kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan demikian secara yuridis formal peran pemerintah kabupaten kota sangat strategi. Peluang yang diberikan harus dimanfaatkan secara tepat untuk segera mungkin menggunakan semua potensi yang dimiliki untuk didayagunakan . Peluang inipun tidak selamanya memiliki keunggulan, tetapi juga memiliki kelemahan yang tentunya pada setiap kabupaten / kota memiliki ciri dan karakteristiknya masing – masing.

Terhadap permasalahan tersebut pemerintah Kota Ternate harus memainkan peran untuk melakukan perubahan paradigma dari sekedar pelaksana menjadi pemrakarsa dan penanggung jawab serta pelayanan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan, terutama pada penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan peran pemerintah Kota Ternate dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu merupakan salah satu langkah tepat , mengingat besarnya permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Ternate. Faktor demokratisasi, dimana proses transisi yang tengah dilakukan saat ini, membawahkan dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang sejalan dengan prinsip – prinsip demokrasi dan tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik . Dari sisi internal birokrasi pemerintah berbagai permasalahan masih dihadapi antara lain : pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang tinggi, rendahnya etos kerja, loyalitas, dedikasi dan kinerja aparatur (manajemen) pemerintahan daerah belum memadai rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum dan rendahnya kesejahteraan PNS. Sedangkan secara eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawah. Hal tersebut terkait dengan meningkatnya keridakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi dan sosial yang terjadi dengan cepat. Makin deras arus informasi dari manca Negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat, serta tuntutan untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya perkembangan teknologi yang semakin cepat. Dari berbagai dinamika perubahan yang terjadi diatas sudah tentu membutuhkan suatu upaya yang lebih terintegrasi dalam upaya mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur Negara. Tuntutan untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawah merupakan salah satu upaya untuk menciptakan Kota Ternate yang bersih dan damai.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian lapangan dengan tidak mengesampingkan studi kepustakaan sebagai penunjang, oleh karena itu penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu : penelitian dengan cara menjelaskan dan menggambarkan serangkaian peristiwa, fenomena atau fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit penelitian di lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang secara tidak langsung peneliti harus turun ke lapangan untuk mempelajari obyek penelitian yang diteliti guna memperoleh data yang dibutuhkan. Berdasarkan penelitian ini yang merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif maka peneliti menggunakan instrumen – instrumen sebagai berikut : Teknik Observasi Sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena – fenomena yang diselidiki . Data observasi berupa deskripsi yang aktual cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan sistem sosial serta konteks dimana kegiatan kegiatan itu berlangsung. Data ini diperoleh berkat adanya penelitian lapangan dengan mengadakan pengamatan secara langsung Nasution . Teknik Dokumentasi Sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan perkiraan terhadap peristiwa itu, dan di rilis dengan sengaja untuk menyimpan dan meneruskan keterangan mengenai peristiwa itu . Sumber – sumber dokumentasi terdiri atas : Sumber primer : Sumber – sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama Sumber sekunder : Sumber yang menggunakan data dari sumber lain

Teknik Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu : pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang - Undang 23 tahun 2014 di mana didalamnya ditegaskan , bahwa pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan , pemberdayaan dan peran serta masyarakat . Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat sampai di kelurahan merupakan salah satu wujud nyata dari tuntutan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga dengan otonomi yang luas yang di berikan kepada pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip prinsip demokrasi , pemerataan, keadilan, transparansi, akuntabilitas serta potensi keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik harus memenuhi karakteristik dan ciri pemerintahan yang baik; antara lain, pertama , Akuntabilitas atau tanggung jawab secara umum terhadap berbagai hal yang ada didalam pemerintahan, pemerintah perlu mempertanggungjawabkan tugas yang telah diamanatkan. Kedua, independensi suatu kondisi netra dan tidak memihak pada pihak manapun,namun pemerintah harus mampu memilih untuk berpihak pilihan yang menguntungkan bagi negara, jadi pemerintah perlu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat maupun pihak swasta serta saling menemukan pilihan yang benar agar dapat keluar dari masalah. Ketiga transparansi, sikap keterbukaan pemerintahn atas segala informasi dan rencana kerja untuk pembangunan nasional. Tujuan dari transparansi agar rakyat dapat mengawasi tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan dan menilai kinerja pemerintah. Ketiga partisipasi merupakan proses keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan karena kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat

Adaptasi dan Kelayakan Nilai Kearifan Dalam Tata Kelola Pemerintahan Baik

Bagi pemerintahan daerah di Maluku Utara, sejumlah daerah memiliki kearifan lokal yang memiliki nilai yang sangat tinggi seperti di Kota Ternate yang berada di wilayah kesultanan Ternate. Adaptasi nilai kearifan falsafah Jou sengofangare di Kesultanan Ternate diterjemahkan lebih luas berkaitan dengan sistem pemerintahan, sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Relasi antara sultan dan rakyat, mengandung arti rakyat yang membentuk negara atau pemerintah, artinya kesejahteraan dan kebahagiaan adalah tanggung jawab bersama antara penguasa dan rakyat. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa sebuah pemerintahan akan berjalan dengan baik dengan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nilai nilai kearifan lokal secara langsung mengisyaratkan bahwa sebuah pemerintahan yang baik harus dibangun untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat baik persolan ekonomi sosial maupun pembangunan. Kekuasaan bukan untuk memperkaya individu atau kelompok tertentu yang berafiliasi dengan pemerintahan. Selain itu kekuasaan harus memsatkan keberlangsungan warga agar dapat hidup dengan nyaman dteratur dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup, jamin atas keamanan dari gangguan baik yang datang dari dalam

maupun dari luar sangatlah penting dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan yang baik.

IV. PENUTUP

Nilai-nilai kearifan lokal bagi penyelenggaraan pemerintahan baik sangat penting, terutama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah hidup yang sudah diwariskan oleh para leluhur seperti *Jou se Ngopangare* mengisyaratkan pentingnya pertanggungjawaban seorang pemimpin dalam konteks yang lebih konstitusional seperti gubernur, bupati maupun walikota. Tanggungjawab atau amanah yang diberikan oleh rakyat harus dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.** 2020. Arti Kearifan Lokal Di Indonesia. <https://tirto.id/arti-kearifan-lokal-di-indonesia-nilai-dimensi-contoh-fungsi-gadt>
- Iftitah Nurul Laily.** 2009. Kearifan Lokal adalah Nilai Luhur, Pahami Ciri-Ciri dan Fungsinya. <https://katadata.co.id/iftitah/berita/6200d042cf539/kearifan-lokal-adalah-nilai-luhur-pahami-ciri-ciri-dan-fungsinya>
- Moleong Lexy J.** 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya Bandung.
- Nawawi, H. Hadari.** 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sedarmayanti.** 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik dalam rangka Otonomi Daerah)*. Bandung, PT Mandar Maju, 2003
- Saimima. I. A.** 2005. *Good Governance & Clean Government (Makalah Diskusi Panel Sistem pemerintahan daerah)* Ambon 12-13 April 2005
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, Tarsito Bandung. 1992
- Sukur Soasiu.** 2006. *Tata Pemerintahan Yang Baik (Makalah Pelatihan Capacity Building)* Ambon 6- 11 Pebruari 2006
- Watloly. A.** 2005. *Maluku Baru Bangkitnya Mesin Eksistensi Anak Negeri*. Jakarta 2005.